

2019

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020**



**DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA PAYAKUMBUH**

KATA PENGANTAR

Langkah awal dari upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan potensi-potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sudah dapat dirumuskan dalam bentuk Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) untuk masa perencanaan Tahun 2019 yang memuat program/kegiatan strategis yang mengacu kepada prioritas hasil musrenbang kecamatan, renstra OPD dan RPJMD Kota Payakumbuh.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan dokumen Perubahan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 sudah dapat dirampungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa penyusunan dokumen rencana kerja ini merupakan bagian dari Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, renja ini adalah jabaran dari program/kegiatan yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Dengan telah selesainya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019 ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait, sesuai dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan Tugas Pokok kedinasan.

Ucapan terima kasih terhadap semua pihak serta Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini, dengan harapan Renja yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan visi, misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk masa lima tahun kedepan. Terima kasih.

Payakumbuh, Agustus 2019
**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh**

HERLINA, SH, M.Si
NIP.19650621 198903 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 pasal 343 ayat 1 Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2019) ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Tahun 2019.

Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua (bulan Mei) tahun 2019, dimana beberapa poin yang ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b) Pergeseran pagu kegiatan antar program dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja Tahun 2019;

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD.

Perubahan Renja Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menyusun dokumen Perubahan Renja ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

Perubahan RKPD Kota Payakumbuh dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada perubahan RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2.Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 56);
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2018

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2019.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sektor Koperasi, UMKM dan Perdagangan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya. Perubahan Renja Tahun 2019 ini sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2019.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022. Perubahan Renja Tahun 2019 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2019.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4.Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab 1 memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM

Pada Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perubahan Renja.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat telaahan terhadap perubahan kebijakan nasional sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan UKM, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM pada Perubahan Renja dan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN LALU SAMPAI DENGAN BULAN MEI

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan capaian kinerja dapat dilihat pada Format 1 Lampiran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019.

Berdasarkan format 1 terlampir dapat dilihat bahwa jumlah dana Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.264.305.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.480.535.471,- atau 92,36%. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan berdasarkan urusan (koperasi dan UMKM dan Perdagangan) adalah sebagai berikut:

- Urusan Koperasi dan UMKM :
 - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk penyediaan materai sebanyak 1.151 buah materai dan 5 paket pengiriman pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.087.500,- atau 95,54% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,22%.
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik dan belanja fax pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.384.313,- atau 55,61% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 82,24%.

3). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan asuransi kebakaran untuk bangunan pasar (kios, toko dan los) sebanyak 8 blok di Pasar Ibu Blok Barat dan Timur. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 158.405.000,- atau 99,15% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,66%.

4). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini direncanakan berupa pembayaran KIR kendaraan dinas roda empat/ pick-up sebanyak 5 unit dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 24 unit kendaraan dinas yaitu 5 unit kendaraan dinas roda empat dan 18 unit kendaraan roda dua pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.622.650,- atau 92,82% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 97,13%.

5). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berupa penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 272.737.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 265.284.500,- atau 97,27% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,91%.

6). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa penyediaan bahan, peralatan dan THL kebersihan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.882.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 348.469.413,- atau 98,19% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,28%.

7). Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 29.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.644.250,- atau 98,77% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,51%.

- 8). **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetak (kwitansi dinas NCR, blanko bernomor, karcis K3 pasar/hijau, karcis K5 pasar Rp500/merah, karcis K5 pasar Rp1.000/biru, karcis K5 pasar Rp2.000/kuning, karcis parkir mobil pribadi dan karcis parkir sepeda motor), penggandaan dan penjilidan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.644.965,- atau 99,31% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,73%.
- 9). **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan pengisian tabung pemadam kebakaran yang dilakukan secara swakelola pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.754.000,- atau 100,00% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 100,00%.
- 10). **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit mesin genset, 3 unit laptop, 1 unit printer dan 2 unit CCTV untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.007.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.672.800,- atau 95,55% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,22%.
- 11). **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Kegiatan ini berupa penyediaan 2 jenis surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Haluan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.161.000,- atau 87,75% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 95,10%.
- 12). **Penyediaan Makanan dan Minuman**
Kegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum rapat maupun makan dan minum tamu pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.999.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.959.400,- atau 99,93% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,97%.

13). Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 315.425.550,- atau 97,15% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,86%.

14). Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Kegiatan ini berupa pembayaran gaji 12 orang THL pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.947.808,- dan terealisasi sebesar Rp. 314.984.944,- atau 99,70% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,88%.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1). Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit, kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 8 (delapan) unit pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.220.000,- atau 93,95% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 97,58%.

2). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini berupa penyediaan jasa servis kendaraan dinas, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas 32 unit kendaraan dinas/operasional pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.913.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.495.250,- atau 95,68% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,27%.

3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa belanja jasa service AC, komputer, mesin tik dan service HT pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.990.000,- atau 61,06% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 84,42%.

4). **Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur**

Kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan mebeleur pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.950.000,- atau 98,33% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,33%.

c. **Peningkatan Disiplin Aparatur**

1). **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Kegiatan ini berupa pengadaan 79 stel pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Dinas koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.697.950,- atau 87,07% dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 94,83%.

d. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1). **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP dan laporan pelaksanaan kegiatan) Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.094.500,- atau 97,97% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,19%.

2). **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik**

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Renja SKPD dan IKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.656.000,- atau 98,37% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,35%.

e. **Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif**

1). **Fasilitasi Pengembangan UKM**

Kegiatan ini berupa temu pelaku usaha sukses untuk 40 UMKM di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.041.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.030.700,- atau 99,95% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,98%.

f. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1). Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini berupa penyelenggaraan pelatihan AMT bagi 30 pengusaha mikro kecil dan pelatihan kewirausahaan bagi 30 orang wirausaha pemula/calon wirausaha di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.104.747,- atau 99,70% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,88%.

2). Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Kegiatan ini berupa pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD untuk 40 koperasi/KUD di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.033.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.523.000,- atau 98,04% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,22%.

3). Penyusunan Buku Profil Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kegiatan ini berupa penyusunan data profil koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.092.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.897.200,- atau 94,62% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 97,85%.

g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1). Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Kegiatan ini berupa sosialisasi KUR dan PKBL-BUMN untuk 40 UMKM di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.451.200,- atau 89,79% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 95,91%.

2). Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan ini berupa rapat-rapat dan survey dalam rangka fasilitasi kegiatan pembinaan dari Tim Kelompok Kerja Keuangan Dana Bergulir Koperasi UMKM Kota Payakumbuh terhadap 30 koperasi yang menerima bantuan dana bergulir. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.689.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.321.670,- atau 93,37% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 97,35%.

3). Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan ini berupa penilaian kesehatan keuangan koperasi dan satgas pengawasan koperasi untuk 140 koperasi penerima dana bantuan Pemerintah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.410.000,- atau 89,03% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 95,61%.

4). Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan expo dalam rangka harkopnas expo untuk 4 UMKM di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.633.900,- atau 99,44% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 99,86%.

h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1). Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Kegiatan ini berupa pelaksanaan rapat lintas sektor tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.745.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.945.000,- atau 62,07% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 84,83%.

2). Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Kegiatan ini berupa sosialisasi Penertiban Badan Hukum Koperasi bagi 15 unit Pra Koperasi yang belum berbadan hukum di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.933.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.119.500,- atau 58,30% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 83,32%.

3). Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan terhadap 120 koperasi di

Kota Payakumbuh, penyelenggaraan Lomba Gerakan Koperasi dan Lomba Penilaian Koperasi Berprestasi dan pemberian penghargaan kepada Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh serta fasilitasi keikutsertaan Pemerintah Kota Payakumbuh pada peringatan Hari Koperasi Nasional yang dilaksanakan di Tangerang Provinsi Banten. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.286.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 244.123.067,- atau 96,38% dengan capaian output 100% sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 98,55%.

- **Urusan Perdagangan**

a. **Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

1) **Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen**
Kegiatan ini berupa pelayanan tera ulang dan pengawasan alat UTTP sebanyak 1.750, pendataan alat UTTP se Kota Payakumbuh, sosialisasi kemetrologian sebanyak 1 kali dengan peserta yaitu sebanyak 75 orang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.248.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 129.177.547,- atau 83,21%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 97,40%.

2) **Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa**

Kegiatan ini berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap harga sembilan bahan pokok, monitoring pengawasan peredaran barang dan jasa, pembagian sembako bersubsidi kepada 2.245 RTS di 5 kelurahan dan pelaksanaan Bazar Ramadhan yang bertempat di pelataran Parkir Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 506.483.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 493.102.000,- atau 97,36%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,94%.

b. **Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

1) **Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha**

Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan 10 kali monitoring terhadap 2 distributor dan 14 pengecer pupuk bersubsidi di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.861.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.719.940,- atau 99,35%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,74%.

2) **Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk**

Kegiatan ini berupa pengecatan pertokoan Ibh Blok Barat, rehab jalan lingkung pasar Ibh Blok Barat dan Timur, Pengadaan sarana kebersihan pasar (BIN kontainer), perencanaan pasar Ibh, Pembangunan kios kuliner Ibh Blok Barat (Samping Los Pisang) (Sisa DAK), Perencanaan pembangunan kanopi pasar rakyat pusat payakumbuh 2 Padang Kaduduk, Lanjutan penimbunan Sirtu Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk, Lanjutan penimbunan Sirtu Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk Tahap II, Renovasi kanopi Pasar Pusat Pertokoan Blok Barat, Pembangunan Pos Pengamanan Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk dan Toilet, Pengerasan Jalan ke TPST Pasar Rakyat Pusat Payakumbuh 2 Padang Kaduduk, Pembangunan Pagar Pengaman Lantai 2 Pasar Pertokoan Blok Timur, Pembangunan Tangga ke Lantai II Pertokoan Blok Timur Pasar Pusat Payakumbuh, Renovasi Gedung UPTD Pondok Promosi dan Pengadaan Pompa Hidran. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.943.873.862,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.528.923.412,- atau 85,90%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 94,36%.

3) Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Kegiatan ini berupa fasilitasi keikutsertaan pada pasar lelang sebanyak 9 kali yang terdiri dari pelaksanaan di dalam daerah 6 kali di Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat dan diluar daerah yaitu 3 kali (1 kali di Pekanbaru, 1 kali di Lampung, dan 1 kali di Kota Jambi). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.664.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.736.720,- atau 81,17%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 92,47%.

4) Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan ini berupa operasional dan pelaporan kegiatan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tim Percepatan Penyelesaian Tunggakan Retribusi Sewa Pasar dan operasional Tim Monitoring Pasar Pabukoan di lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.721.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.634.652,- atau 89,82%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,93%.

5) Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan

Kegiatan ini berupa operasional Pondok Promosi dan distribusi produk unggulan lokal Kota Payakumbuh, pameran/expo dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, luar daerah Propinsi Sumatera Barat dan luar negeri dalam rangka mempromosikan dan memasarkan produk UMKM Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.136.986.928,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.046.825.027,- atau 92,07%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 96,83%.

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Usaha Perdagangan

Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin sarana pasar (Pemeliharaan rutin tenda pasar, bangunan pasar, drainase pasar). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 328.109.534,- atau 89,51 %, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 95,80%.

c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1) Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Kegiatan ini berupa operasional penertiban pasar dan penataan tempat berusaha bagi 60 orang Pedagang Kaki Lima. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.795.296.932,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.783.203.670,- atau 99,33%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 99,73%.

2) Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan penyuluhan mutu dagangan terhadap pedagang kaki lima dan asongan dengan peserta sebanyak 100 orang atau 1 kali pertemuan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.146.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.939.000,- atau 95,86%, dengan capaian output 100% sehingga Capaian Indikator Kegiatan sebesar 98,34%.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang pada tahun 2019 ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.577.564.370,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) melaksanakan 8 (delapan) program dan 33 kegiatan dengan realisasi anggaran sampai triwulan II (bulan Mei) sebesar Rp. 1.146.229.284,- atau 25,04%. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tingkat realisasinya masih rendah serta

kondisi anggaran kas yang berada pada triwulan III dan IV. Kegiatan yang realisasinya masih rendah diantaranya :

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah (0,36%)
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (0%)
- Pemeliharaan rutin berkala mebeleur (0%),
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (0%),
- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (0%),
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (2%),
- Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM (3,17%),
- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah (0%),
- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi (9,85%),
- Pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi (4,66%) dan
- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM (6,89%).

Dalam Urusan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.9.053.579.876,- (sembilan milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sampai triwulan II (bulan Mei) sebesar Rp. 972.079.237,- atau 10,74%. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran sampai keadaan pada triwulan II (bulan Mei) disebabkan beberapa kegiatan yang tingkat realisasi sangat rendah diantaranya :

- Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen (1,13%)
- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (2,16%)
- Pengadaan sarana prasarana kemetrolgian (0%)
- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (2,46%)
- Pengembangan pasar lelang daerah (4,17%)

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari program tersebut diatas adalah:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini secara fisik telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tagihan rekening listrik, air dan telepon pada Dinas Koperasi dan UKM, namun karena kesalahan dalam mengalokasikan anggaran kegiatan menyebabkan rendahnya persentase realisasi keuangan. Solusinya untuk tahun selanjutnya dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena suku cadang terletak pada belanja jasa service sehingga tidak bisa dicairkan. Solusinya untuk selanjutnya suku cadang dimasukkan dalam rekening yang semestinya.
- c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Rendahnya realisasi keuangan pada Kegiatan ini disebabkan karena Honor Tenaga Tim Fasilitasi Pembubaran Koperasi tidak bisa dicairkan karena tidak terdapat dalam standar biaya. Solusinya untuk tahun berikutnya perlu dibuatkan standar biaya khusus.
- d. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena kurangnya permintaan masyarakat/pra koperasi untuk melaksanakan sosialisasi koperasi, sehingga honor narasumber, notulen dan biaya makan minum sosialisasi tidak bisa dicairkan. Selain itu juga ada biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak cair. Solusinya untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lagi penyuluhan untuk memotivasi masyarakat mendirikan koperasi.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 11 program dan 42 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh pada Tahun Anggaran 2018, secara keseluruhan terlaksana dengan sangat baik, dengan capaian rata-rata 92,36%.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
Tahun 2018

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530.120/SK/DKUKM-SEK/2018, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2018 diharapkan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi
2. Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM

Sesuai dengan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM yang disajikan pada format 2 pada Lampiran Renja ini, dapat dilihat bahwa dari 4 sasaran strategis di atas terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM yaitu :

1. Persentase peningkatan SHU koperasi
2. Persentase pertumbuhan aset koperasi
3. Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM
4. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM
5. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
6. Persentase pertumbuhan omset
7. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Berdasarkan format 2 pada lampiran terlihat bahwa capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator 1, dengan capaian kinerja 37,70%, indikator 3 dengan capaian 55,25% dan indikator 6 dengan capaian kinerja 23,89%. Sedangkan indikator yang melebihi target adalah indikator 2 dengan capaian kinerja 106,00%, indikator 4 dengan capaian 118,17% dan indikator 5 dengan capaian kinerja 100,79% serta indikator 7 dengan capaian kinerja 115,14%.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi

Terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase Peningkatan SHU Koperasi

Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 dan 2018 sangat rendah bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam IKU dan penetapan kinerja tahun 2017 dan 2018. Penurunan capaian indikator kinerja persentase peningkatan SHU pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan karena jumlah koperasi di Kota

Payakumbuh berkurang sebanyak 14 koperasi, dari 158 koperasi pada tahun 2016 menjadi 144 koperasi pada tahun 2017 dan menjadi 145 tahun 2018. Pengurangan jumlah koperasi tersebut karena ada 16 koperasi yang dibubarkan pada tahun 2017, dan ada koperasi baru sebanyak 2 koperasi pada tahun 2017 dan penambahan 1 koperasi pada tahun 2018. Pembubaran koperasi karena koperasi tersebut sudah tidak aktif lagi, pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif lagi secara kuantitas akan mengurangi jumlah koperasi namun secara kualitas bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas koperasi yang ada di Kota Payakumbuh. Dengan adanya pembubaran koperasi yang tidak aktif ini otomatis SHU dari koperasi yang dibubarkan tersebut akan hilang dan tidak termasuk dalam penghitungan SHU koperasi pada tahun 2017 sehingga persentase peningkatan SHU koperasi pada tahun 2017 mengalami penurunan namun pada tahun 2018 persentase peningkatan SHU koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017, namun masih belum mencapai target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah koperasi yang tidak aktif dari 10 unit menjadi 65 unit pada tahun 2018. Penambahan jumlah koperasi tidak aktif ini disebabkan karena perubahan cara penghitungan keaktifan koperasi, dimana mulai tahun 2018 koperasi yang aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun berjalan, sedangkan yang tidak melaksanakan RAT dianggap koperasi yang tidak aktif, berbeda dari tahun sebelumnya dimana koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut-turut baru digolongkan ke dalam koperasi yang tidak aktif, sehingga pada tahun 2018 jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah banyak. Berdasarkan jenis koperasi yang ada di Kota Payakumbuh yang terbanyak adalah koperasi serba usaha, koperasi fungsional (koperasi pegawai negeri) dan koperasi tani, yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

Faktor Penghambat terjadinya ketidaktercapaiannya target 10.00% atas peningkatan SHU koperasi di Kota Payakumbuh terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Keaktifan koperasi di Kota Payakumbuh terjadi penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 80 koperasi dari tahun sebelumnya sebanyak 133 koperasi, penurunan ini disebabkan salah satunya pada pola perhitungan indikator keaktifan koperasi. Dari 133 koperasi tersebut terdapat hampir 30 koperasi yang statusnya kritis yang membutuhkan pembinaan sangat intens untuk mendongkrak keaktifan koperasi tersebut, sehingga untuk mengejar SHU 10% masih sangat berat. Selanjutnya terkait dengan keaktifan koperasi dalam melakukan RAT baru 80% dari koperasi aktif tahun 2018 yang melaksanakan.
2. Koperasi di Kota Payakumbuh dalam kategori sehat dan cukup sehat sebanyak 46 koperasi dari 80 koperasi yang aktif, sehingga persentasenya sebesar 57,5%. Koperasi yang sehat dan cukup sehat tersebut tentu berpengaruh terhadap capaian SHU koperasi di Kota Payakumbuh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adanya sistem laporan keuangan koperasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah yang seharusnya.

Strategi dalam mengatasi persoalan untuk mencapai target 12% persentase peningkatan SHU koperasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 akan dilaksanakan :

1. Peningkatan SDM pengelola dan pengurus koperasi melalui pendanaan dari APBD dan DAK tahun 2019 yang berfokus pada : aspek pelaporan keuangan koperasi dan manajemen kelembagaan perkoperasian.
2. Monitoring kegiatan perkoperasian di 133 koperasi yang ada di Kota Payakumbuh yang fokus pada tema-tema pasca pelatihan perkoperasian yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Membuka akses permodalan dalam bentuk fasilitasi antara koperasi di Kota Payakumbuh dengan penyedia permodalan di tingkat Propinsi

Sumatera Barat antara lain BKE (Bank Kesejahteraan Ekonomi) dan KPRI (Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia).

2. Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi

Capaian kinerja nyata indikator Persentase pertumbuhan aset koperasi adalah sebesar 5,30% dari target sebesar 5,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,00% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun kedua Renstra, capaian Tahun 2018 sebesar 5,30% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Koperasi dan UKM sebesar 12,60% maka capaian kinerjanya mencapai 42,06%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sudah melebihi target yang ditetapkan namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,24%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi yang ditunjukkan dari pertumbuhan aset koperasi sebesar 5,30% disebabkan disebabkan faktor pendukung antara lain :

1. Tahun 2018 terjadi pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Payakumbuh sebanyak 1 unit yang telah berbadan hukum dan 3 unit yang masih dalam proses pengajuan badan hukum.
2. Beberapa koperasi yang bergerak dalam izin usaha simpan pinjam memperluas bidang usahanya ke usaha lain yang menyebabkan penambahan aset koperasi seperti koperasi usaha waserda, yang membutuhkan aset etalase, ruangan, mesin kasir dan lain-lain. Tahun 2018 koperasi yang menambah bidang usaha tersebut ada 4 koperasi (Koperasi Pemasaran Kopay, KPRI Tut Wuri Handayani, KPRI Ihwan Depag dan KSU Harapan Baru).

Faktor Penghambat

1. Volume usaha koperasi pada umumnya belum optimal.
2. Masih rendahnya kapasitas SDM pengurus dan manajemen koperasi.

Strategi yang dikerjakan untuk mengatasi persoalan pertumbuhan aset koperasi agar tetap diatas 5% setiap tahunnya antara lain :

1. Melakukan revitalisasi terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif.
2. Meningkatkan akses permodalan bagi koperasi.
3. Merangsang pengurus koperasi untuk mengurus badan hukum dari koperasi yang dikelolanya.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah

Terdiri atas 2 indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase UKM terhadap UMKM

Capaian nyata indikator persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM adalah 15,27% dari target 27,64% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 55,25% atau dibawah target yang diperjanjikan. Pada tahun 2018 jumlah usaha mikro dan usaha menengah-besar meningkat lebih tajam dari tahun-tahun sebelumnya, namun usaha kecil mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena usaha kecil yang telah ada berkembang menjadi usaha menengah-besar dan sebagian lagi turun menjadi usaha mikro yang menyebabkan meningkatnya jumlah usaha mikro di Kota Payakumbuh.

Faktor Penghambat indikator persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM adalah :

Tidak tercapainya target persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM disebabkan oleh tidak berkembangnya usaha mikro terutama dalam hal produktivitas dan kapasitas usaha. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang relatif tidak stabil 2 tahun terakhir, dimana beberapa hal menjadi faktor yang mempengaruhinya, antara lain fluktuasi nilai rupiah, fluktuasi harga bahan bakar minyak, dan kondisi perpolitikan terkait dengan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Kondisi tersebut mempengaruhi harga dan distribusi bahan baku bagi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro. Pada dasarnya usaha mikro adalah usaha yang paling sensitif terhadap kondisi tersebut di

atas karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, antara lain keterbatasan akses permodalan, SDM, dan manajemen pengelolaan usaha itu sendiri.

2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM

Capaian kinerja nyata indikator persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM adalah sebesar 14,18% dari target sebesar 12,00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 118,17% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Faktor pendukung tercapainya target kinerja :

1. Tenaga kerja sektor UMKM lebih banyak disumbangkan oleh lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan karena pada prinsipnya pengelolaan usaha di sektor tersebut lebih banyak dikelola secara tradisional dan sampingan dan tidak tergantung dengan bahan baku yang beredar di pasaran.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan :

1. Meningkatkan program untuk sektor mikro yang terkait dengan peningkatan SDM dan kelembagaan usaha disamping membuka ruang untuk fasilitasi permodalan
2. Meningkatkan pola pembinaan melalui pendamping usaha dengan meningkatkan jumlah tenaga pendamping langsung di lapangan (rekrutmen tenaga pendamping)
3. Meningkatkan anggaran pembinaan untuk mendukung program pembinaan dan peningkatan SDM UMKM
4. Memfasilitasi peralatan pendukung usaha berbasis teknologi tepat guna melalui sumber-sumber lain disamping dana hibah.
5. Meningkatkan daya saing usaha terutama dalam hal pemasaran hasil.
6. Mensosialisasikan program diversifikasi usaha terkait dengan ketersediaan pangsa pasar yang ada.

Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan

Terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Capaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB merupakan angka yang diperoleh dari BPS Kota Payakumbuh. Tahun 2018 per Januari 2018 angka kontribusi sektor perdagangan belum muncul di Buku PDRB, biasanya baru dirilis pada bulan Agustus, karena angkanya belum ada maka kontribusi sektor perdagangan belum bisa terlalu detail.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh berdasarkan angka proyeksi menggunakan tren kenaikan 5 tahun, karena BPS belum mengeluarkan data PDRB. Berdasarkan angka proyeksi capaian nyata indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh nilai 24,16% dari target 23,97% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,79% atau melebihi target yang diperjanjikan.

2. Persentase pertumbuhan omset

Untuk perhitungan omset menggunakan asumsi omset untuk 3 (tiga) komoditi unggulan Kota Payakumbuh yaitu beras dan daging sapi dan telur. Diasumsikan bahwa semua produksi padi di Kota Payakumbuh diproses menjadi beras dengan angka konversi GKP (Gabah Kering Panen) menjadi beras sebesar 52%, dipasarkan di pasar Ibuah Barat dan Timur dan ke sentra-sentra pemasaran beras di sekitar Kota Payakumbuh sampai ke Propinsi Riau. Demikian juga dengan produksi daging sapi yang diambil dari data pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) Kota Payakumbuh yang diasumsikan semuanya dipasarkan di Pasar Ibuah Barat dan Timur. Selanjutnya untuk telur diambil dari data produksi telur selama 2 (dua) tahun terakhir dan semuanya dipasarkan di Pasar Ibuah Barat dan Timur.

capaian kinerja nyata indikator persentase pertumbuhan omset adalah 6,45% dari 27,00% target kinerja yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 23,89% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Indikator kinerja persentase pertumbuhan omset merupakan indikator kinerja baru, dimana belum ada pada tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian nyata indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan jumlah anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 Rp. 4.577.564.370,- terdiri dari 8 program dengan 33 kegiatan. Kemudian dalam usulan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 diusulkan menjadi Rp.4.856.753.142,- atau ada penambahan sebesar Rp.279.188.772,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 75.600.000 menjadi Rp. 63.600.000. dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 12.000.000,-. Pengurangan disebabkan karena penyesuaian dengan belanja listrik
 - 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 286.308.000 menjadi Rp. 308.517.000,- . dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.22.209.000,- Penambahan disebabkan karena Penyesuaian honor pengelola keuangan dan penambahan uang lembur
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.266.142.120 menjadi Rp. 1.357.285.368,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.91.143.248,- Penambahan disebabkan karena Penyesuaian honor THL dengan UMP tahun 2019 dan Penambahan honor untuk 1 orang THL
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 25.770.000 menjadi Rp. 30.320.000,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.4.550.000,-. Penambahan disebabkan untuk biaya foto copy
 - 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 23.500.000,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 13.500.000,-. Penambahan disebabkan untuk finger print, radio wifi (pasar) dan laptop 1 unit

- 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 450.010.000,- menjadi Rp. 568.395.000,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 118.385.000,-. Penambahan ini disebabkan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
 - 7) Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 327.238.128,- menjadi Rp. 369.761.652,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.42.523.524,- . Penambahan disebabkan karena penyesuaian honor THL dengan UMP tahun 2019
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional dengan anggaran sebesar Rp. 234.013.000 menjadi Rp. 238.941.000,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp.4.928.000,- Penambahan untuk BBM kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan kendaraan dinas roda 2 (4 unit)
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000 menjadi Rp. 11.000.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 2.000.000,-. Pengurangan disebabkan karena efisiensi anggaran
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.53.200.000 menjadi Rp. 49.150.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 4.050.000,-. Pengurangan disebabkan karena penyesuaian dengan sisa kontrak
 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - 1) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dengan anggaran sebesar Rp. 27.910.000,- menjadi Rp. 25.510.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 2.400.000,- Pengurangan disebabkan karena pengurangan uang saku temu pelaku usaha sukses yang tidak jadi dilaksanakan
 5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dengan anggaran sebesar Rp.34.247.500,- menjadi Rp. 36.647.500,-. Dalam anggaran perubahan

bertambah sebesar Rp. 2.400.000,- Penambahan disebabkan karena kurangnya anggaran untuk pelatihan kewirausahaan

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.745.000,- menjadi Rp. 4.345.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 400.000,-. Pengurangan disebabkan karena penyesuaian dengan standar biaya
- 2) Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp. 23.683.000,- menjadi Rp. 26.583.000,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 2.900.000,-. Penambahan disebabkan karena pergeseran antar rekening dan penambahan pembelian 1 unit komputer
- 3) Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi dengan anggaran sebesar Rp. 126.106.000,- menjadi Rp. 123.606.000,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 2.500.000. Pengurangan disebabkan karena efisiensi anggaran

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9.053.579.876,- terdiri dari 3 program dengan 11 kegiatan. Dalam usulan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp.9.093.678.547,- atau pengurangan sebesar Rp.40.098.671,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk dengan anggaran sebesar Rp. 4.321.790.000,- menjadi Rp. 4.288.496.125,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 33.293.875,- Pengurangan disebabkan karena adanya pergeseran antar rekening dan penambahan honor THL kebersihan pasar padang kaduduk
- 2) Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101.634.000,- menjadi Rp. 265.622.150,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 163.988.150,-. Penambahan disebabkan karena adanya penambahan

kegiatan sosialisasi, sarana prasarana ruang pelayanan PAD dan belanja cetak karcis

- 3) Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan dengan anggaran sebesar 1.375.081.100,- menjadi Rp. 1.103.651.200,-. Dalam anggaran perubahan berkurang sebesar Rp. 271.429.900,-. Pengurangan disebabkan karena pekerjaan pengadaan gazebo dan dipindah ke kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 1) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dengan anggaran sebesar Rp. 1.684.518.576,- menjadi Rp. 1.865.352.872,-. Dalam anggaran perubahan bertambah sebesar Rp. 180.834.296,-. Penambahan anggaran untuk penyesuaian honor THL sesuai UMP 2019

Rincian untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada matrik Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 Kota Payakumbuh pada Lampiran 2.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh ini dirumuskan sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk lebih terukurnya hasil-hasil program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Renja ini dirumuskan beberapa sasaran capaian dengan indikator sasaran yang tepat dan terukur dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan arahan khususnya dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk Tahun 2019.

Rencana kerja ini dibuat dan disusun lebih komprehensif dengan mengedepankan logika perencanaan yang berbasis input dari lingkungan sekitar yang dijabarkan dalam berbagai isu-isu strategis dan telaahan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan itu sendiri.

Dalam rangkaian proses penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019, dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan terhadap usulan perubahan Renja.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan segala potensi KUMKM di Kota Payakumbuh serta sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Payakumbuh, Agustus 2019
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005

Lampiran 1 : EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2018		Terget Kinerja Anggaran Renja Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar														
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89	14.203.735.599	77,11	1.709.500.285	81,00	2.724.591.870	81,72	996.154.584		2.705.654.869	-	19,05	
	1	Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat	jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	1151 lembar materai dan 5 paket pengiriman /tahun	35.152.158		5.087.500	1151 lembar materai dan 5 paket pengiriman	5.325.000		500 lembar materai dan 5 paket pengiriman	1.992.000		7.079.500		20,14
	2	Kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air, listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	4 rek.P LN; 3 rek. PDA M; 3 rek.T elkom /tahun	635.417.240		51.384.313	4 rek listrik, 3 rek air, 3 rek telepon	75.600.000		4 rek listrik, 3 rek air, 3 rek telepon	17.883.564		69.267.877		10,90

3	Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah bangunan pasar berupa toko, kios dan los yang dibayarkan premi asuransi	34 Blok (Pake t)/tah un	2.945.726.985	8 blok	158.405.000	8 blok	162.585.000		585.000		158.990.000		5,40
4	Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	32 unit/t ahun	39.923.398	32 unit	4.622.650	32 unit	14.500.000	10 unit	2.701.850		7.324.500		18,35
5	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	50 Orang /th	894.950.638	50 orang	265.284.500	50 orang	286.308.000	50 orang	92.504.000		357.788.500		39,98
6	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli	32 jenis	2.123.243.757	31 jenis	348.469.413	30 jenis	1.266.142.120	30 jenis	475.126.414		823.595.827		38,79
		Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan honoranya	15 orang /tahun	-	13 orang		15 orang		15 orang					
7	Kegiatan : penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	59 Jenis	200.213.900	59 Jenis	28.644.250	50 Jenis	28.920.622	50 jenis	14.221.000		42.865.250		21,41
8	Kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis karcis retribusi yang dicetak	17Jen is/tah un	525.509.316	17Jenis	74.644.965	7Jenis	25.770.000	7 jenis	6.751.000		81.395.965		15,49
9	Kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	9 jenis/t ahun	36.667.745	9 jenis	5.754.000	9 jenis	5.754.000	9 jenis	997.000		6.751.000		18,41
10	Kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	55 unit/t ahun	1.618.334.495	5 unit	71.672.800	2 unit	10.000.000	2 unit	7.854.000		79.526.800		4,91

11	Kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	1800 exp/ta hun	68.057.244	1800 exp	9.161.000	1800 exp	10.440.000	900 exp	3.045.000		12.206.000		17,93
12	Kegiatan : penyediaan makanan dan minuman	jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	1500 porsi makan minu m rapat dan 350 porsi makan minu m tamu/ tahun	394.303.495	1500 porsi makan minu m rapat dan 350 porsi makan minu m tamu	55.959.400	1500 porsi makan minu m rapat dan 350 porsi makan minu m tamu	55.999.000	975 porsi makan minu m rapat dan 300 porsi makan minu m tamu	18.906.900		74.866.300		18,99
13	Kegiatan : rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	52 kali/ta hun	2.242.996.608	52 kali	315.425.550	342 kali	450.010.000	32 kali	239.951.394		555.376.944		24,76
14	Kegiatan : penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	jumlah tenaga administrasi /teknis perkantoran yang dibayarkan	12 orang /tahun	2.443.238.620	12 orang	314.984.944	12 orang	327.238.128	12 orang	113.635.462		428.620.406		17,54
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%	2.709.969.091	80%	538.655.250	80%	973.612.000		51.056.000		589.711.250		21,76
1	Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	16 unit	720.000.000	9 unit	338.220.000	4 unit	723.599.000		-		338.220.000		46,98

2	Kegiatan : pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilaksanakan pemeliharaannya	32 unit	1.637.761.991	32 unit	186.495.250	32 unit	234.013.000	32 unit	49.126.000		235.621.250		14,39
3	Kegiatan : pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilaksanakan pemeliharaannya	1 tahun	115.391.800		10.990.000	26 unit komputer, 2 unit AC, 2 unit mesin tik, 3 unit HT	13.000.000		1.930.000		12.920.000		11,20
4	Kegiatan : pemeliharaan rutin berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang dilaksanakan pemeliharaannya	12 bulan	18.315.300		2.950.000	4 unit	3.000.000		-		2.950.000		16,11
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	219.150.000	100%	33.697.950	100%	53.200.000		-		33.697.950		15,38
1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	79 orang /tahun	219.150.000	79 orang	33.697.950	79 orang	53.200.000		-		33.697.950		15,38
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	72.930.290	A	7.750.500	A	7.040.000		1.441.500		9.192.000		12,60
1	Kegiatan : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dilaksanakan	2 dokumen	48.946.520	2 dokumen	5.094.500	2 dokumen	4.340.000	2 dokumen	-		5.094.500		10,41
2	Kegiatan : penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	jumlah laporan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	2 dokumen	23.983.770	2 dokumen	2.656.000	2 dokumen	2.700.000	2 dokumen	1.441.500		4.097.500		17,08

Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	V	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	2%	358.283.850	1,50%	23.030.700	1,40%	27.910.000		21.052.800		44.083.500		12,30
	1	Kegiatan : Fasilitasi pengembangan UKM	Jumlah peserta temu pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	358.283.850	40 UMKM	23.030.700	40 UMKM	27.910.000		21.052.800		44.083.500		12,30
			Jumlah pelatihan pembukuan yang dilaksanakan							40 UMKM					
			Jumlah UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	-	200 UMKM	-	120 UMKM		55 UMKM	-		-	-	
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	VI	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	1. Persentase pertumbuhan tenaga manajer UMKM	2,00%	1.356.973.189	0,60%	187.524.947	1,40%	209.360.000		28.984.800		216.509.747		15,96
			2. Persentase pertumbuhan tenaga pembukuan UMKM	2,00%		1,20%		1,40%							
	1	Kegiatan : penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha yang dilaksanakan	30 UMKM/tahun	420.217.108	30 UMKM	53.104.747	30 UMKM	34.247.500		684.100				
			Jumlah peserta AMT bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang dilaksanakan	30 UMKM/tahun		30 UMKM	-	30 UMKM	-		-		-		

	2	Kegiatan : pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	40 koperasi/KUD/tahun	179.141.581	40 koperasi/KUD	25.523.000	120 orang	74.740.000	40 orang	25.119.600		50.642.600		28,27
	3	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Terlaksananya kegiatan promosi produk UMKM luar Provinsi	9 UMK M, 4 UMK M/tahun	80.942.000	9 UMKM, 4 UMKM	-		-		-		-		-
	4	Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen Buku Profil Koperasi dan UMKM yang dicetak	1 dokumen	676.672.501	1 dokumen	108.897.200	40 buku	100.372.500		3.181.100		112.078.300		16,56
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	VI	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	1. Persentase peningkatan modal UMKM	3,50%	822.030.574	1,30%	140.816.770	2,50%	66.816.500	13.768.900	154.585.670		18,81		
			2. Persentase pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	2,20%		1,57%		1,70%							
	1	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMK M/tahun	97.794.446	45 UMKM	14.451.200	45 UMK M	13.895.000	45 UMK M	12.373.900		26.825.100		27,43
			Jumlah peserta sosialisasi PKBL-BUMN yang dilaksanakan	45 UMK M/tahun	-	45 UMKM		45 UMK M		45 UMK M					
	2	Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi/tahun	244.370.278	30 koperasi	33.321.670	30 koperasi	6.809.500		975.000		34.296.670		14,03

	3	Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya	70 koperasi/tahun	75.714.085	70 koperasi	9.410.000	70 koperasi	7.520.000	-		9.410.000	12,43
			Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi/tahun		70 koperasi		70 koperasi					
	4	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	4 UMK M/tahun	404.151.765	4 UMKM	83.633.900	20 UMK M	38.592.000	420.000		84.053.900	20,80
Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	VI II	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Persentase penurunan jumlah tunggakan	25%	2.225.665.500	2,70%	262.187.567	5%	515.034.000	33.770.700	295.958.267	-	13,30
			2. Persentase peningkatan koperasi aktif	49%		40,00%		48,00%					
			3. Persentase peningkatan koperasi sehat	11,90%		15,11%		11,60%					
	1	Kegiatan : sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	15 Pra Koperasi/Koperasi	320.419.771	15 Pra Koperasi/Koperasi	15.119.500	15 Pra Koperasi/Koperasi	23.683.000	2 Pra Koperasi/Koperasi	2.332.000	17.451.500	5,45
	2	Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	5 koperasi tidak aktif	71.357.779	5 koperasi tidak aktif	2.945.000	5 koperasi tidak aktif	4.745.000		720.000	3.665.000	5,14
	3	Kegiatan : pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	1. Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	- 20 SLTA /30 koperasi	1.833.887.950	- 20 SLTA/30 koperasi	244.123.067	- 20 SLTA/30 koperasi	126.106.000		5.878.700	250.001.767	13,63

			2. Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh	- 10 koperasi		- 10 koperasi		- 10 koperasi							
			3. Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	- 90 koperasi		- 90 koperasi		- 90 koperasi							
			4. Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	- 120 koperasi		- 120 koperasi		- 120 koperasi							
		Kegiatan : Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM						120 koperasi/80 UMK M	360.500.000						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	IX	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	80%	4.399.509.180	60%	622.279.547	65,00 %	1.154.900.700	7.728.000	630.007.547	-	14,32		
			2. Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	5,50 %		3,50%		4,00%							
	1	Kegiatan : fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	1.175.340.026	1750 unit	129.177.547	1750 unit	110.252.000	1.241.000	130.418.547		11,10		
			Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%							

	2	Kegiatan : peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	1. Jumlah kegiatan monitoring sembako yang dilaksanakan	49 kali	3.224.169.154	49 kali	493.102.000	225 kali	438.648.700	49 kali	6.487.000		499.589.000		15,50
			2. Jumlah RTS yang menerima pembagian sembako	2245 RTS		2245 RTS		2245 RTS		2245 RTS					
			3. Jumlah Bazar ramadhan yang dilaksanakan	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali					
			4. Jumlah pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang dilaksanakan	4 kali		4 kali		2 kali							
		Kegiatan : Pengadaan sarana prasarana kemetrologian	Jumlah pengadaan sarana prasarana kemetrologian yang dilaksanakan	1 paket				1 paket	606.000.000						
Meningka tunya pertumbu han ekonomi sektor perdagang an	X	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	35 kerjas ama	33.587.217.130	31 kerjasa ma	4.143.949.285	32 kerjas ama	6.191.974.600		398.431.585		4.542.380.870		13,52
	1	Kegiatan : fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	1. Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	1. 2 distri butor dan 14 penge cer	137.448.928	1. 2 distrib utor dan 14 penge cer	21.719.940	1. 2 distrib utor dan 14 penge cer	20.861.500	1. 2 distrib utor dan 14 penge cer	6.220.640		27.940.580		20,33
			2. Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	2. 4 distri butor		2. 4 distrib utor		2. 4 distrib utor		2. 4 distrib utor					

			3. Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha					3. 13 pengumpul		13 pengumpul					
	2	Kegiatan : pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	jumlah prasarana pasar yang dikembangkan		20.453.755.442		2.528.923.412	22 paket	4.321.790.000	6 paket	21.249.697		2.550.173.109		12,47
	3	kegiatan : pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang dilaksanakan	9 kali/tahun	801.679.126	9 kali	111.736.720	9 kali	39.528.000		1.647.000		113.383.720		14,14
	5	kegiatan : peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	1 tahun	810.577.941	1 tahun	106.634.652	1. 10 jenis	101.634.000	1 tahun	6.298.600		112.933.252		13,93
			2. Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali				2. 1 kali			1 kali				
	6	kegiatan : pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM Kota Payakumbuh yang dilaksanakan	12 kali/tahun	4.866.747.631	12 kali	1.046.825.027	12 kali	1.375.081.100	8 kali	247.851.412		1.294.676.439		26,60
			Jumlah workshop produk kreatif yang dilaksanakan	3 Paket/tahun	-	3 Paket		3 Paket		1 paket	-		-		
			Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang /tahun	-	50 orang		50 orang			-		-		
			Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang /tahun	-	50 orang		50 orang			-		-		
			Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala	12 kali/tahun	-	12 kali		12 kali		6 ksli	-		-		

	7	Kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	- Pemeliharaan rutin bangunan pasar - Pemeliharaan rutin drainase pasar	3 paket/ tahun	1.853.339.843	2 paket	328.109.534	2 paket	333.080.000	1 paket	115.164.236		443.273.770		23,92
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	XI	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	90%	13.356.159.525	70%	1.811.142.670	75%	1.706.704.576		565.919.652		2.377.062.322		17,80
	1	Kegiatan : penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional rantib pasar	60 orang /th	13.139.992.932	60 orang	1.783.203.670	60 orang	1.684.518.576	60 orang	546.413.152		2.329.616.822		17,73
			Jumlah THL rantib pasar	53 orang /th		53 orang	-	53 orang	-	53 orang	-	-		-	
2	Kegiatan : pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali /tahun	216.166.593	2 kali	27.939.000	2 kali	22.186.000	2 kali	19.506.500		47.445.500		21,95	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	XI I	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Volume Perdagangan Luar Negeri	6 ton	675.000.000	-	-	-	-	-	-		-		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program					73.986.623.926		9.480.535.471		13.631.144.246		2.118.308.521		11.598.843.992	-	

Lampiran 2 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

Lembar Dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (tahun berjalan)						Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perang at Daerah Penangg ung Jawab			
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 7 - 6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	02	11		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
11	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A								
11	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	materai, cek, perangko	1151 materai dan 5 paket pengiriman	5.325.000	5.325.000	-	DAU	1151 materai dan 5 paket pengiriman	5.595.000	a	DKUKM
11	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air, listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	jasa komunikasi i air listrik dan telepon kantor dan pondok promosi	4 rek listrik, 3 rek air dan 3 rek telepon	75.600.000	63.600.000	(12.000.000)	DAU	4 rek listrik, 3 rek air dan 3 rek telepon	59.400.000	a	DKUKM
11	01	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah bangunan pasar berupa toko, kios dan los yang dibayarkan premi asuransi	bangunan pasar	8 Blok (Paket)	162.585.000	162.585.000	-	DAU	8 Blok (Paket)	159.762.850	a	DKUKM

11	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak	pajak dinas roda 2 dan roda 4	5 kendaraan roda 4, 27 kendaraan roda 2	14.500.000	14.500.000	-	DAU	5 kendaraan roda 4, 27 kendaraan roda 2	14.500.000	a	DKUKM
11	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	pelayanan administrasi perkantoran	50 orang	286.308.000	308.517.000	22.209.000	PAD	50 orang	300.552.000	a	DKUKM
11	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	peralatan dan bahan kebersihan kantor	30 jenis	1.266.142.120	1.357.285.368	91.143.248	DBH Provinsi	30 jenis	448.014.919	a	DKUKM
					Jumlah THL kebersihan yang dibayarkan honorinya	THL/Non PNS	15 orang					15 orang			
11	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	Alat Tulis Kantor	50 jenis	28.920.622	28.920.622	-	DAU	50 jenis	26.041.275	a	DKUKM
11	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang dicetak	Barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	25.770.000	30.320.000	4.550.000	DAU	7 jenis	23.769.810	a	DKUKM
11	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Perlengkapan listrik kantor	9 jenis	5.754.000	5.754.000	-	DAU	9 jenis	5.753.450	a	DKUKM
11	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	10.000.000	23.500.000	13.500.000	DAU	1 unit	11.155.000	a	DKUKM
11	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	bahan bacaan/koran	1800 exp	10.440.000	10.440.000	-	DAU	1800 exp	9.158.600	a	DKUKM
11	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	pelayanan makan dan minum kantor	1500 porsi makan minum rapat dan 350 porsi makan minum tamu serta 4 jenis makan minum pegawai	55.999.000	55.999.000	-	DAU	1206 porsi makan minum rapat dan 350 porsi makan minum tamu serta 4 jenis makan minum pegawai	47.914.000	a	DKUKM

11	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	instansi terkait/stak eholder	342 kali	450.010.000	568.395.000	118.385.000	DAU	342 kali	237.247.000	a	DKUKM
11	01	01	19	Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibayarkan	Tenaga Non PNS/THL	12 orang	327.238.128	369.761.652	42.523.524	DAU	12 orang	341.318.448	a	DKUKM
11	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A	973.612.000	976.540.000	2.928.000		A	226.342.300		
11	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		4 unit	723.599.000	723.599.000	-	DAK Fisik Penugasan	4 unit	-	a	DKUKM
11	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan Pemeliharannya	kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	5 unit roda 4, 27 unit kendaraan roda 2	234.013.000	238.941.000	4.928.000	DAU	5 unit roda 4, 27 unit kendaraan roda 2	212.865.300	a	DKUKM
11	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilaksanakan Pemeliharannya	peralatan gedung kantor	26 unit komputer, 2 unit AC, 2 unit mesin tik, 3 unit HT	13.000.000	11.000.000	(2.000.000)	DAU	26 unit komputer, 2 unit AC, 2 unit mesin tik, 3 unit HT	10.539.500	a	DKUKM
11	01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dilaksanakan Pemeliharannya		4 unit	3.000.000	3.000.000	-	DAU	4 unit	2.937.500	a	DKUKM
11	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A	53.200.000	49.150.000	(4.050.000)		A	54.700.000		
11	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang Diadakan	aparatur	79 orang	53.200.000	49.150.000	(4.050.000)	DAU	79 orang	54.700.000	a	DKUKM
11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A	7.040.000	7.040.000	-		A	7.037.675		

11	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	Dokumen pelaporan	2 dokumen	4.340.000	4.340.000	-	DAU	2 dokumen	4.338.575	a	DKUKM
11	01	06	07	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	Dokumen perencanaan dan pelayanan publik	2 dokumen	2.700.000	2.700.000	-	DAU	2 dokumen	2.699.100	a	DKUKM
11	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UKM terhadap UMKM		28,15%	27.910.000	25.510.000	(2.400.000)		28,66%	35.557.450		
11	01	15	08	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	1. Jumlah Peserta Temu Pelaku Usaha Sukses yang Dilaksanakan	Pengusaha mikro, kecil, menengah di Kota Payakumbuh dan Data	40 peserta	27.910.000	25.510.000	(2.400.000)	DAU	40 peserta	35.557.450	a	DKUKM
				2. Jumlah UMKM Binaan yang Dimonitoring	120 UMKM binaan		120 UMKM binaan								
11	01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM		14%	209.360.000	211.760.000	2.400.000		16,00%	124.796.740		
11	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	1. Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula/ Calon Wirausaha Baru yang Dilaksanakan	UMKM	30 UMKM	34.247.500	36.647.500	2.400.000	DAU	30 UMKM	36.439.140	a	DKUKM
				2. Jumlah Peserta AMT bagi Pengusaha Mikro dan Kecil yang Dilaksanakan	30 UMKM		30 UMKM								

11	01	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Koperasi/ KUD yang Dilaksanakan	Koperasi	40 koperasi	74.740.000	74.740.000	-	DAU	40 koperasi	88.357.600	a	DKUKM
11	01	16	12	Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen Buku Profil Koperasi dan UMKM yang Disusun	dokumen	40 buku	100.372.500	100.372.500	-	DAU	40 buku	-	a	DKUKM
11	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM terhadap UMKM		28,15%	66.816.500	66.816.500	-		28,66%	76.892.575		
11	01	17	01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1. Jumlah Peserta Sosialisasi KUR yang Dilaksanakan 2. Jumlah Peserta Sosialisasi PKBL-BUMN yang Dilaksanakan	UMKM	45 UMKM 45 UMKM	13.895.000	13.895.000	-	DAU	45 UMKM 45 UMKM	-	a	DKUKM
11	01	17	04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang Dikoordinir Penggunaan Dana Permerintahnya	Koperasi	30 koperasi	6.809.500	6.809.500	-	DAU	30 koperasi	22.446.000	a	DKUKM
11	01	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	1. Jumlah Koperasi yang Dipantau Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintahnya 2. Jumlah Koperasi peserta sosialisasi	koperasi	70 koperasi 70 koperasi	7.520.000	7.520.000	-	DAU	70 koperasi 70 koperasi	-	a	DKUKM
11	01	17	09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang Terlibat Dalam Kegiatan Harkopnas Expo	UMKM	20 UMKM	38.592.000	38.592.000	-	DAU	20 UMKM	54.446.575	a	DKUKM
11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan SHU Persentase pertumbuhan aset koperasi		12,15% 6,50%	515.034.000	515.034.000	-		14,25% 8,55%	134.123.601		

11	01	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi yang Tidak Aktif yang Dibubarkan	koperasi	5 koperasi yang tidak aktif	4.745.000	4.345.000	(400.000)	DAU	5 koperasi yang tidak aktif	-	a	DKUKM
11	01	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Pra Koperasi/ Koperasi yang Badan Hukumnya Ditertibkan	Pra koperasi/koperasi	15 pra koperasi/koperasi	23.683.000	26.583.000	2.900.000	DAU	15 pra koperasi/koperasi	49.742.851	a	DKUKM
11	01	18	05	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	1. Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	Siswa SLTA dan koperasi	20 SLTA/30 koperasi	126.106.000	123.606.000	(2.500.000)	DAU	20 SLTA/30 koperasi	84.380.750	a	DKUKM
					2. Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh	Koperasi	10 koperasi					10 koperasi			
					3. Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	Koperasi	90 koperasi					90 koperasi			
					4. Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	koperasi simpan pinjam	120 koperasi					120 koperasi			
11	01	18	10	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	koperasi dan UMKM	120 koperasi/80 UMKM	360.500.000	360.500.000	-	DAK Non Fisik	120 koperasi/80 UMKM	-		
11	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			24,02%	1.154.900.700	1.154.900.700	-		24,07%	367.678.010		
				Persentase pertumbuhan omset			29,00%					31,00%			
11	01	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan	1. Jumlah Alat UTTP yang dilakukan tera ulang	Alat UTTP konsumen dan pelaku usaha	1750 unit	110.252.000	110.252.000	-	DAU	1750 unit	112.494.050	a	DKUKM

				pengaduan konsumen	2. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Alat UTTP konsumen dan pelaku usaha	100%					100%			
11	01	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1. Jumlah Monitoring harga Sembako yang Dilaksanakan	Pedagang sembako	225 kali	438.648.700	438.648.700	-	DBH Provinsi	225 kali	255.183.960	a	DKUKM
					2. Jumlah RTS yang Menerima Pembagian Sembako	Masyarakat miskin	2245 RTS					2245 RTS			
					3. Jumlah Bazar Ramadhan yang Dilaksanakan	Masyarakat miskin	1 kali					1 kali			
					4. Jumlah Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan	Pedagang kaki lima, asongan dan kuliner Kota Payakumbuh	2 kali					2 kali			
11	01	15	05	Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolgian				606.000.000	606.000.000		DAK Fisik Penugasan		-		
11	01	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		24,02%	6.191.974.600	6.051.238.975	(140.735.625)		24,02%	2.544.087.088		
					Persentase pertumbuhan omset		29,00%					29,00%			
11	01	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	1. Jumlah Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	Distributor dan pengecer pupuk bersubsidi	1. 2 distributor dan 14 pengecer	20.861.500	20.861.500	-	DAU	1. 2 distributor dan 14 pengecer	18.696.390	a	DKUKM
					2. Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	Distributor beras	2. 4 distributor					2. 4 distributor			

					3. Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usaha	pengumpul hasil bumi	3. 12 pengumpul					3. 13 pengumpul			
11	01	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Prasarana Pasar yang Dikembangkan		22 paket	4.321.790.000	4.288.496.125	(33.293.875)	DAU	22 paket	970.960.369	a	DKUKM
11	01	18	05	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event Pasar Lelang Dalam/ luar Daerah yang Diikuti	komoditi kota payakumbuh	9 kali	39.528.000	39.528.000	-	DAU	9 kali	39.527.000	a	DKUKM
11	01	18	09	Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah	1. Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD 2. pelaksanaan pasar pabukoan		10 jenis 1 kali	101.634.000	265.622.150	163.988.150	DAU	10 jenis 1 kali	324.236.614	a	DKUKM
11	01	18	10	Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	1. Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Kota Payakumbuh yang Dilaksanakan 2. Jumlah Workshop Produk Kreatif yang Dilaksanakan 3. Jumlah Peserta Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Melalui Media Online yang Dilaksanakan 4. Jumlah Peserta Sosialisasi tentang Cara Peningkatan Produk UMKM yang Dilaksanakan 5 Termonitor dan Terevaluasinya Produk UMKM Secara Berkala	Produk UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM	1. 12 kali 2. 3 paket 3. 50 orang 4. 50 orang	1.375.081.100	1.103.651.200	(271.429.900)	DAU, DBH Provinsi	1. 12 kali 2. 3 paket 3. 50 orang 4. 50 orang	876.161.550	a	DKUKM
11	01	18	11	Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	1. Pemeliharaan rutin bangunan pasar 2. Peliharaan rutin drainase pasar	bangunan pasar drainase pasar	1 paket 1 paket	333.080.000	333.080.000	-	DAU	1 paket 1 paket	314.505.165	a	DKUKM

11	01	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		24,02%	1.706.704.576	1.887.538.872	180.834.296		24,02%	1.823.370.587		
					Persentase pertumbuhan omset		29,00%					29,00%			
11	01	19	03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tim operasional transtib pasar		60 orang	1.684.518.576	1.865.352.872	180.834.296	DBH Provinsi	60 orang	1.801.187.987	a	DKUKM
					Jumlah THL transtib pasar	THL	53 orang					53 orang			
11	01	19	05	Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	Pedagang kaki lima, asongan dan kuliner Kota Payakumbuh	2 kali	22.186.000	22.186.000	-	DAU	2 kali	22.182.600	a	DKUKM

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19650621 198903 2 005

Lampiran :

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	1. Persentase peningkatan SHU koperasi	12,15%
	2. Persentase pertumbuhan aset koperasi	6,50%
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	3. Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	28,15%
	4. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	14,00%
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24,02%
	6. Persentase pertumbuhan omset	29,00%
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	7. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, 3 Januari 2019
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

DAHLER, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621031 198503 1 005

Lampiran :

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kota : Payakumbuh
Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	1. Persentase peningkatan SHU koperasi	10,00%	6,03%	60,33%
		2. Persentase pertumbuhan aset koperasi	5,00%	5,30%	106,00%
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	3. Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	27,64%	15,27%	55,25%
		4. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	12,00%	14,18%	118,17%
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,97%	24,16%	100,79%
		6. Persentase pertumbuhan omset	27,00%	6,45%	23,89%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	7. Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	A	115,14%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Rp. 10.264.305.090,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Rp. 9.480.535.471,-

Payakumbuh, Januari 2019
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

DAHLER, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621031 198503 1 005